

# Paradigma Baru Madrasah dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013

**Andi Prastowo**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
e-mail:anditarbiyah@gmail.com

---

DOI: 10.14421/jpi.2014.31.95-113

---

## **Abstrac**

*Policy implementation is a process applying of decision of policy which usually early with compilation of program, project of till to activities for resolving a problem of becoming policy agenda. Ministry of Religion Republic Of Indonesia also have plan for the implementation of policy of Curriculum 2013 in all ladder of madrasah, including one of them at ladder of madrasah ibtidaiyah, start year 2014. This implementation have of implication to change various education aspect in madrasah like Standard Process, Standard Content, Standard Interest Grad, Standard Assessment, and also at Textbook Iesson. This paradigm becomes someone reference or institution in taking decision and policy to act.*

**Keywords:**Madrasah, Paradigm, Policy, Curriculum 2013

## **Abstrak**

Implementasi kebijakan adalah suatu proses penerapan keputusan kebijakan yang biasanya diawali dengan penyusunan program, proyek hingga ke kegiatan-kegiatan untuk pemecahan suatu masalah yang menjadi agenda kebijakan. Kementerian Agama Republik Indonesia juga berencana untuk mengimplementasikan kebijakan Kurikulum 2013 di semua jenjang madrasah, termasuk salah satunya pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, mulai tahun 2014. Implementasi ini berimplikasi pada perubahan berbagai aspek pendidikan di madrasah seperti Standar Proses, Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, maupun pada Buku Teks Pelajaran. Paradigma ini menjadi acuan seseorang atau institusi dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk bertindak.

**Kata Kunci:**Madrasah, Paradigma, Kebijakan, Kurikulum 2013

## Pendahuluan

Pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia secara resmi telah menetapkan untuk mengimplementasikan salah satu produk kebijakannya dalam bidang pendidikan dasar dan menengah, yaitu Kurikulum 2013. Dalam tahap awal pelaksanaannya, Kurikulum 2013 ini diimplementasi secara bertahap dimulai dari kelas I dan IV SD, kelas VII SMP, dan kelas X SMA pada beberapa sekolah yang ditunjuk. Menurut Mulyasa, kebijakan ini ditetapkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini, terutama dalam memasuki era globalisasi yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Dengan demikian, melalui kebijakan kurikulum yang baru ini masyarakat dan bangsa Indonesia dapat mencapai keunggulan dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan oleh haluan negara.<sup>1</sup>

Hal tersebut selaras dengan pendapat James Anderson yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.<sup>2</sup> Ini artinya bahwa dikeluarkannya kebijakan perubahan kurikulum sebelumnya (KTSP 2006) dengan Kurikulum 2013 tidak terlepas karena adanya persoalan yang harus segera dan perlu dituntaskan pada pendidikan dasar dan menengah.

Persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Indonesia di antaranya: *pertama*, berdasarkan hasil survei “*Trends in International Math and Science*” tahun 2007, yang dilakukan oleh *Global Institute*, menunjukkan hanya lima persen peserta didik Indonesia yang mampu mengerjakan soal penalaran berkategori tinggi; padahal peserta didik Korea dapat mencapai 71 persen. Sebaliknya, 78 persen peserta didik Indonesia dapat mengerjakan soal hapalan berkategori rendah, sementara siswa Korea 10 persen. Data lain diungkapkan oleh *Programme for International Student Assessment (PISA)*, hasil studinya tahun 2009 menempatkan Indonesia pada peringkat bawah 10 besar, dari 65 negara peserta PISA. Hampir semua peserta didik Indonesia ternyata cuma menguasai pelajaran sampai level tiga saja, sementara banyak peserta didik dari negara lain dapat menguasai pelajaran sampai level empat, lima, bahkan enam. Hasil dari kedua survei tersebut merujuk pada suatu simpulan bahwa: prestasi peserta didik Indonesia tertinggal dan terbelakang.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 163

<sup>2</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)* (Yogyakarta: CPAS, 2011), hlm. 21

<sup>3</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi...*, hlm. 60

*Kedua*, dalam kehidupan di masyarakat ada kecenderungan terjadinya dekadensi moral, seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian, tindakan anarkis dan berbagai tindakan tidak baik lainnya. Hal ini kalau dibiarkan maka keberadaan bangsa dan negara Indonesia terancam eksistensinya. Para pakar pendidikan mengkhawatirkan bangsa Indonesia sedang menuju kehancuran dengan ditandai sikap dan perilaku sebagian masyarakat yang cenderung amoral dan kurang menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

*Ketiga*, di sekolah anak didik belum mendapatkan internalisasi nilai-nilai secara matang dan bermakna. Hal ini disebabkan dalam proses belajar mengajar masih terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, sehingga aspek afektif dan psikomotorik yang bermuatan karakter kurang diperhatikan. Hal ini diperparah lagi pembelajaran di sekolah masih berorientasi pada penguasaan materi untuk persiapan menghadapi ujian nasional. Dan ditambah lagi kemampuan anak didik di Indonesia dalam menjawab soal-soal yang menuntut kemampuan berpikir tinggi juga masih rendah.<sup>4</sup>

*Keempat* berkaitan dengan globalisasi dan pasar bebas, masalah lingkungan hidup, pesatnya kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu, dan investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, serta materi TIMSS dan PISA yang harus dimiliki oleh peserta didik.<sup>5</sup> *Problem kelima* adalah adanya sejumlah kelemahan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) terdiri dari: (1) konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak; (2) kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; (3) kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan; (4) beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan *soft skills* dan *hard skills*, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum; (5) kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global; dan (6) standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Kunandar, *Penilaian Autentik, Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.18

<sup>5</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi...*, hlm. 63-64

<sup>6</sup> Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik Terpadu* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 28-29.

Karena berbagai persoalan itulah, kebijakan tentang perubahan dan pengembangan kurikulum, yang dimulai dengan penataan terhadap empat elemen standar nasional, yaitu standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar penilaian mutlak dikembangkan dan segera diimplementasikan.

Senada dengan hal itu, Kunandar menyatakan bahwa pengembangan kurikulum mutlak diperlukan untuk menjawab tantangan masa depan yang dihadapi Bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan jika tantangan tersebut tidak segera direspon, maka Indonesia akan kehilangan momentum untuk mempersiapkan generasi emas 100 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045.<sup>7</sup> Dan, Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum berbasis karakter dan kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap kritikan Kurikulum 2006, serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja.<sup>8</sup>

Kebijakan perubahan kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ke Kurikulum 2013 ini sesungguhnya merupakan hal yang wajar. Karena perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional. Hal ini termasuk penyempurnaan kurikulum di Indonesia (yang dituangkan dalam kebijakan implementasi kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah) untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.<sup>9</sup>

Kajian merupakan studi pustaka yang berusaha menggali, merangkai, dan menganalisis berbagai pemikiran maupun teori tentang implementasi kebijakan perubahan kurikulum 2013 dan pentingnya perubahan paradigma madrasah dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut di madrasah ibtidaiyah. Dengan demikian diharapkan melalui kajian pada artikel ini dapat disumbangkan gagasan dan ide tentang perubahan paradigma kepala madrasah yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah.

## **Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Di Madrasah Ibtidaiyah**

Perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Bahkan menurut Riant Nugroho, kontribusi konsep mencapai 60% dari keberhasilan, khususnya di zaman sekarang di mana data dan informasi

<sup>7</sup> Kunandar, *Penilaian Autentik ...*, hlm.21

<sup>8</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi...*, hlm. 163

<sup>9</sup> Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik ...*, hlm. 19

tentang masa depan pun sudah bisa diakses. Jika konsep yang baik sudah dimiliki, 60% keberhasilan sudah di tangan. Namun, yang 60% itu pun akan hangus jika 40% implementasinya tidak konsisten dengan konsep. Malangnya lagi, ada banyak peneliti yang menemukan bahwa dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsisten implementasi antara 10—20% saja. Dari sini dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan itu memang krusial.<sup>10</sup>

Implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah diatur berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia No. SE/Dj.I/PP.00/50/2013 yang ditandatangani Dirjen Pendis pada tanggal 8 Juli 2013 yang menetapkan bahwa pelaksanaannya dimulai pada tahun pelajaran 2014/2015. Pada tahun pelajaran tersebut, untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah implementasi kurikulum 2013 direncanakan akan dilaksanakan hanya untuk kelas I dan IV. Sedangkan pada tahun pelajaran 2013/2014, Kementerian Agama melakukan persiapan implementasi kurikulum 2013 dalam bentuk pelatihan kepala madrasah, pengawas madrasah, pendidik serta pengadaan bahan ajar dan buku pedoman guru.

Sebagai salah satu acuan dari SE Dirjen Pendis tersebut yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81a Tahun 2013 tentang *Implementasi Kurikulum*. Pasal 1 dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa, “Implementasi kurikulum pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK) dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014”.

Berdasarkan dua kebijakan tersebut dapat dipahami bahwa implementasi kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah agak berbeda dengan implementasi di Sekolah Dasar. Karena, implementasi kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah permulaan pelaksanaannya berbeda dengan Sekolah Dasar. Seperti telah dijelaskan di depan bahwa implementasi kurikulum 2013 baru mulai dilaksanakan pada semua madrasah ibtidaiyah secara terbatas (khusus kelas I dan IV) pada tahun pelajaran 2014/2015 sedangkan implementasi kurikulum baru ini di SD sudah dimulai pada bulan Juli 2013 meskipun hanya pada sejumlah sekolah yang ditunjuk dan secara terbatas pula.

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah menggunakan strategi yang hampir sama dengan strategi yang digunakan untuk Sekolah Dasar yakni, pada tahap permulaan, dilaksanakan secara terbatas (hanya

<sup>10</sup> Riant Nugroho, *Public Policy*, Cet. IV, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 674

untuk kelas I dan IV) untuk semua madrasah ibtidaiyah baik negeri maupun swasta.

Sebagai perbandingan berikut ini adalah gambaran agenda pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: *tahap pertama*, dilaksanakan mulai Juli 2013 khusus untuk kelas I, IV, VII dan X; *tahap kedua*, dilaksanakan mulai Juli 2014 untuk kelas I, II, IV, VII, VIII, X, dan XI; dan *tahap ketiga*, dilaksanakan Juli 2015 untuk kelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII.<sup>11</sup> Jadi pada tahun 2015, semua sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud direncanakan sudah melaksanakan Kurikulum 2013.

Sementara itu, Pasal 2 Permendikbud No. 81a Tahun 2013 mengatur bahwa implementasi kurikulum pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup: *pertama*, Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; *kedua*, Pedoman Pengembangan Muatan Lokal; *ketiga*, Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler; *keempat*, Pedoman Umum Pembelajaran; dan *kelima*, Pedoman Evaluasi Kurikulum. Dengan kata lain, proses implementasi kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah juga tidak begitu berbeda dengan proses implementasi yang berlangsung di Sekolah Dasar, yakni merujuk pedoman implementasi yang dikembangkan oleh Kemendikbud tersebut, meskipun pada beberapa aspek dilakukan penyesuaian, seperti di antaranya pada aspek standar isi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, mata pelajaran Bahasa Arab dan pengadaan buku ajar serta buku pegangan bagi guru.

Hal tersebut dipertegas oleh penjelasan Nur Syam, bahwa Pendidikan Agama Islam di Madrasah (Ibtidaiyah) berbeda dengan sekolah umum. Khusus untuk proses penyusunan buku tersebut, Kementerian Agama mengerjakannya sendiri dengan disesuaikan semangat Kurikulum 2013 dan menggunakan pendekatan tematik-integratif. Sedangkan buku wajib bidang studi, Madrasah Ibtidaiyah menggunakan buku-buku yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud.<sup>12</sup>

Implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan perubahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari Kurikulum 2006 (KTSP) menjadi Kurikulum 2013, dapat mencapai tujuannya. Sebagaimana diungkapkan Riant Nugroho, "Implementasi kebijakan pada

<sup>11</sup> Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, *Strategi Implementasi Kurikulum 2013* (Jakarta: Kemendikbud, 2013), hlm. 3

+ Anonim, *Kurikulum 2013, Kemag Latih 140.000 Guru Madrasah*, Diupload Tanggal 12 Agustus 2013 Pukul 9.45 di [www.suarapembaruan.com/home/kurikulum-2013-kemag-latih-140000-guru-madrasah/39819](http://www.suarapembaruan.com/home/kurikulum-2013-kemag-latih-140000-guru-madrasah/39819), dan diakses pada Tanggal 10 April 2014 Pukul 23.29 WIB

prinsipnya adalah cara agar semua kebijakan dapat mencapai tujuannya”.<sup>13</sup> Tujuan Kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.<sup>14</sup> Sementara itu, tema kurikulum ini yaitu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif afektif; melalui penguatan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.<sup>15</sup>

Sedangkan orientasi kurikulum baru ini, Kurikulum 2013, adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (*attitude*), keterampilan (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*). Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan Pasal 35, yaitu kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Hal ini sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.<sup>16</sup>

Strategi yang disiapkan oleh Pemerintah dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 di Sekolah/Madrasah yaitu: *pertama*, pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan, dari tahun 2013 – 2015; *kedua*, pengembangan buku siswa dan buku pegangan guru dari tahun 2012 – 2014; *ketiga*, pengembangan manajemen, kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah (budaya kerja guru) terutama untuk SMA dan SMK, dimulai dari bulan Januari – Desember 2013; dan *keempat*, pendampingan dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan, yaitu mulai Juli 2013 – 2016.<sup>17</sup>

Sedangkan fase pelaksanaan dimulai pada bulan Juli 2013 untuk Sekolah Dasar dan pada bulan Juli 2014 untuk Madrasah Ibtidaiyah dengan diberikan pendampingan dari beberapa pihak yang terkait. Kemudian, evaluasinya dilaksanakan pada semua tahapan yang dilalui dari semua proses implementasi kurikulum tersebut, yaitu dari fase persiapan, pelatihan pelatih nasional, pelatihan guru inti, pelatihan bagi guru, hingga fase pelaksanaan kurikulum di sekolah dan pendampingannya.

<sup>13</sup> Riant Nugroho, *Public Policy...*, hlm. 674

<sup>14</sup> Kunandar, *Penilaian Autentik ...*, hlm. 16

<sup>15</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi...*, hlm. 99

<sup>16</sup> Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik ...*, hlm. 28

<sup>17</sup> Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, *Strategi Implementasi ...*, hlm. 3-4

Terdapat empat elemen perubahan dalam Kurikulum 2013 yang harus dilaksanakan oleh para guru yaitu *pertama*, standar kompetensi lulusan; *kedua*, standar proses; *ketiga*, standar isi; dan *keempat*, standar penilaian.<sup>18</sup> Secara khusus, elemen perubahan pada kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (terutama pada mata pelajaran non-pendidikan agama Islam dan budi pekerti)<sup>19</sup> lebih ditekankan pada aspek afektif, dengan penilaian yang ditekankan pada jenis penilaian non-tes dan portofolio. Dalam implementasi kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter ini, murid MI idealnya tidak lagi banyak menghafal, karena kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan peserta didik memiliki budi pekerti atau karakter yang baik, sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya.

### Paradigma Baru Madrasah dalam Kurikulum 2013

Perubahan kebijakan kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang sedianya akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2014/2015 menuntut perubahan paradigma kepala madrasah. Hal ini merujuk pandangan Thomas S. Kuhn yang berpendapat bahwa perbedaan paradigma dua orang dalam melihat sebuah objek persoalan yang sama dapat menghasilkan efek hasil yang berbeda.<sup>20</sup> Dengan kata lain, ketika bentuk kurikulum yang direvisi oleh kepala madrasah telah berubah, yakni dari Kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013, kemudian paradigma yang digunakan tidak turut berubah sesuai dengan karakteristik kurikulum baru maka hasilnya juga tidak akan sesuai yang diharapkan. Padahal maksud dari implementasi perubahan kurikulum, dari KTSP menjadi Kurikulum 2013, adalah agar kualitas pendidikan di sekolah maupun di madrasah dapat meningkat selaras dengan upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kurikulum sebelumnya. Dengan demikian, jika paradigma kepala madrasah tidak bisa menyelaraskan dengan tuntutan perubahan dan karakteristik kurikulum baru ini, Kurikulum 2013, maka kualitas pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah tidak akan berubah.

Paradigma baru kepala madrasah menjadi sangat urgen dalam persoalan keberhasilan implementasi kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah mengingat kunci sukses pertama yang menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 adalah kepemimpinan kepala madrasah. Kepemimpinan di sini terutama dalam mengorganisasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Lebih lanjut dikatakan Mulyasa bahwa kepemimpinan

<sup>18</sup> Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik ...*, hlm. 35

<sup>19</sup> Dasarnya adalah kurikulum MI untuk mata pelajaran umum atau bukan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sama dengan kurikulum Sekolah Dasar.

<sup>20</sup> Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Cet. VI (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 50

kepala madrasah merupakan salah satu faktor penentu yang dapat menggerakkan semua sumber daya sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, dalam menyukseskan implementasi Kurikulum 2013 diperlukan kepala sekolah yang mandiri, dan profesional dengan kemampuan manajemen serta kepemimpinan yang tangguh, agar mampu mengambil keputusan dan prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah diperlukan, terutama untuk memobilisasi sumber daya sekolah dalam kaitannya dengan perencanaan dan evaluasi program sekolah, pembelajaran, pengelolaan ketenagaan, sarana dan sumber belajar, keuangan, pelayanan siswa, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Selain itu, keberhasilan Kurikulum 2013, menuntut kepala sekolah yang demokratis profesional, sehingga mampu menumbuhkan iklim demokratis di sekolah, yang akan mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi terciptanya kualitas pendidikan dan pembelajaran yang optimal untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik.<sup>21</sup>

Pentingnya paradigma baru kepala madrasah dalam implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah juga karena kepala madrasah-lah yang menentukan visi madrasah. Sebagaimana diungkapkan Riant Nugroho bahwa visi melekat pada individu yang memimpin organisasi dan setiap pemimpin organisasi harus mempunyai visi ke mana organisasi dibawa selama di bawah kepemimpinannya.<sup>22</sup> Ini artinya, kepala madrasah yang visinya jauh dari karakteristik dan tuntutan kurikulum 2013 maka sangat sulit bagi dirinya untuk mampumengimplementasikan kurikulum 2013 dengan baik, efektif, dan efisien. Meskipun diakui pula bahwa kunci sukses implementasi kurikulum 2013 sesungguhnya melibatkan banyak faktor lain, seperti kreativitas guru, aktivitas peserta didik, sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan yang kondusif akademik, dan partisipasi warga madrasah.<sup>23</sup> Namun, kesekian banyak faktor inikecenderungannya ditentukan oleh kepemimpinan kepala madrasah. Hal ini mengingat kepala madrasah adalah sosok yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan madrasah. Padahal implementasi kurikulum perlu didukung oleh kebijakan kepala madrasah.<sup>24</sup> Jika kebijakan madrasah tidak dikembangkan dengan paradigma baru yang selaras dengan karakteristik dan tuntutan kurikulum 2013 maka kebijakan madrasah yang dihasilkan juga tidak sesuai dengan tuntutan dan karakteristik implementasi kurikulum 2013. Dengan kata lain, paradigma baru kepala madrasah dalam kebijakan implementasi kurikulum 2013 menjadi suatu yang sangat urgen untuk dikembangkan.

<sup>21</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi...*, hlm. 39-40

<sup>22</sup> Riant Nugroho, *Public Policy...*, hlm. 676

<sup>23</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi...*, hlm. 39

<sup>24</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi...*, hlm. 106

Paradigma secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *paradigm* yang berarti *type of something, model, pattern* (bentuk sesuatu, model, pola). Secara terminologi paradigma berarti *a total view of problem; a total outlook, not just a problem in isolation* dan secara sederhana paradigma diartikan sebagai cara pandang dan cara berpikir.<sup>25</sup> Paradigma kepala madrasah sebagai dasar dalam implementasi perubahan kurikulum 2013 adalah cara berpikir atau sketsa pandang menyeluruh yang mendasari tentang pelaksanaan perubahan kurikulum 2013.

Mengingat kurikulum untuk pendidikan dasar dan menengah dengan kurikulum 2006 dipandang terdapat banyak kelemahan maka mulai tahun 2013 kurikulum tersebut diganti dan disempurnakan dengan Kurikulum 2013. Seiring dengan perubahan tersebut, paradigma baru kepala madrasah yang selaras dengan paradigma kurikulum 2013 sangat dibutuhkan dalam upaya menunjang keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah. Berikut ini sejumlah paradigma baru yang diperlukan kepala madrasah dalam mengefektifkan implementasi kurikulum 2013 yaitu.

#### a. Madrasah sebagai pusat pembelajaran yang senyatanya

Sejalan dengan aliran progresivisme, sebagaimana diungkapkan oleh George R. Knight, proses pendidikan menemukan asal-muasal dan tujuannya pada anak. Maksudnya, peserta didik merupakan pusat pembelajaran. Oleh karena itu, kebutuhan, kepentingan, dan inisiatif peserta didik menjadi pangkal dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran. Peserta didik mempunyai suatu keinginan alami untuk belajar dan menemukan berbagai hal tentang dunia di sekelilingnya. Mereka tidak hanya mempunyai keinginan bawaan lahir (*inborn*), melainkan juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Keinginan dan kebutuhan itu memberi anak ketertarikan tertentu untuk mempelajari berbagai hal yang akan membantunya memecahkan problem-problem dan karena itu memenuhi keinginan-keinginannya.<sup>26</sup>

Dalam konteks implementasi kurikulum 2013, ketertarikan peserta didik tersebut harus dimanfaatkan oleh guru yang akan mengembangkan suatu lingkungan belajar di mana dorongan yang memotivasi secara alamiah akan mengarahkan peserta didik pada hasil-hasil belajar yang diinginkan. Dari sudut pandang tersebut, bermula dari peserta didik adalah cara yang paling

<sup>25</sup> Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia* (Yogyakarta: Safiria Insania Press Bekerjasama dengan Magister Studi Islam UII, 2003), hlm. 94-95

<sup>26</sup> George R. Knight, *Filsafat Pendidikan*, Diterj. oleh: Mahmud Arif (Yogyakarta: CDIE bekerjasama dengan Gama Media, 2007), hlm. 149

mudah dan alamiah bagi pendidikan untuk beroperasi. Di sini pendidikan menggunakan daya motivasional dari ketertarikan alami anak dan karena itu pula sekaligus membantu siswa dan guru bekerjasama bukan malahan “mengadu” mereka satu sama lain dalam interaksi yang berlawanan. Hal ini membuka jalan untuk hubungan yang lebih humanis (manusiawi) di dalam ruang kelas dan mengizinkan guru untuk berhubungan dengan siswa dalam keseluruhan kompleksitasnya.<sup>27</sup>

Di samping itu, pengelola dan penyelenggara pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah harus memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam kemajuan perkembangan peserta didik. Karena seperti dijelaskan Piaget bahwa seluruh peserta didik tumbuh melewati urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan tersebut berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Sebab itu guru harus mampu melakukan upaya untuk mengatur kegiatan kelas dalam bentuk kelompok kecil daripada bentuk kelas yang utuh.<sup>28</sup>

Sejalan dengan hal itu, Thomas Armstrong menyatakan, bahwa semua anak memiliki kecenderungan yang berbeda dalam kedelapan kecerdasan (teori *multiple intelligences*) sehingga setiap strategi pembelajaran tertentu mungkin akan angkat sukses pada satu kelompok peserta didik, dan kurang berhasil pada kelompok lainnya. Dan, karena perbedaan-perbedaan individual ini ada di antara para peserta didik, guru disarankan paling baik untuk menggunakan berbagai strategi pengajaran dengan peserta didik mereka.<sup>29</sup> Ini artinya realitas perbedaan individual pada peserta didik di madrasah ibtidaiyah dalam konteks implementasi kurikulum 2013 hendaknya direspon dengan penggunaan multi-strategi pembelajaran, bukan mono-strategi.

Agar implementasi Kurikulum 2013 berhasil memperhatikan perbedaan individual peserta didik, menurut Mulyasa guru perlu memperhatikan hal-hal berikut:<sup>30</sup> *pertama*, guru menggunakan metode yang bervariasi; *kedua*, guru memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik; *ketiga*, guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, serta disesuaikan dengan mata pelajaran; *keempat*, guru memodifikasi dan memperkaya bahan pembelajaran; *kelima*, guru menghubungi spesialis, bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan; *keenam*, guru menggunakan

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 149

<sup>28</sup> Trianto, *Medesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, Landasan dan Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Cet. VI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 31

<sup>29</sup> Thomas Armstrong, *Kecerdasan Multipel di dalam Kelas*, (Jakarta: Indeks, 2013), hlm. 79

<sup>30</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi...*, hlm. 43

prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan laporan; *ketujuh*, guru memahami bahwa peserta didik tidak berkembang dalam kecepatan yang sama; *kedelapan*, guru mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap anak bekerja dengan kemampuan masing-masing pada setiap pelajaran; dan *kesembilan*, guru mengusahakan keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan pembelajaran.

## b. Struktur kurikulum dikembangkan secara holistik

Dalam konteks implementasi kurikulum 2013, pengembangan struktur kurikulum dilakukan secara holistik dan integratif berfokus kepada alam, sosial dan budaya dengan pertimbangan bahwa kecenderungan anak Madrasah Ibtidaiyah ketika belajar mempunyai tiga karakteristik yang menonjol yaitu: konkret, integratif, dan hierarkis. Dijelaskan ketiga karakteristik ini secara detail oleh Rusman sebagai berikut:<sup>31</sup> *pertama*, konkret maksudnya proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret<sup>32</sup> dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pembelajaran yang berkualitas bagi anak usia SD/MI. Penggunaan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna dan bernilai, karenasiswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, lebih bermakna, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. *Kedua*, integratif maksudnya adalah memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan dan terpadu. Anak usia SD/MI belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu, hal ini menggambarkan cara berpikir deduktif.<sup>33</sup> Dengan demikian, keterpaduan konsep tidak dipilah-pilah dalam berbagai disiplin ilmu, tetapi dikait-kaitkan menjadi pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*). Hal serupa juga diungkapkan Trianto, bahwa pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan.<sup>34</sup> *Ketiga*, hierarkis maksudnya adalah berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Oleh karena itu, dalam hal ini persoalan-persoalan seperti urutan logis, keterkaitan antar materi pelajaran, dan cakupan keluasan materi pelajaran menjadi penting dan sangat perlu untuk diperhatikan.

<sup>31</sup> Rusman, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Cet. V (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 251-252

<sup>32</sup> Konkret di sini maksudnya adalah yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik.

<sup>33</sup> Cara berpikir deduktif adalah suatu cara memahami suatu realitas dari hal-hal yang umum ke bagian demi bagian.

<sup>34</sup> Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran...*, hlm. 11

**c. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses interaktif-aktif**

Paradigma ketiga ini dibangun berdasarkan pandangan yang menyatakan bahwa, *pertama*, siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi peserta didik agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, menurut teori konstruktivisme, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide.<sup>35</sup> *Kedua*, sejalan dengan pandangan David Ausubel, yakni agar terjadi belajar bermakna, konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif peserta didik. Kemudian, *ketiga*, pendapat Brunner yang menyatakan bahwa, para peserta didik hendaknya belajar melalui partisipasi aktif dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip, agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen-eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu sendiri.<sup>36</sup> Terakhir, *keempat*, pandangan Vygotsky yakni bahwa fase mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul pada percakapan atau kerjasama antar peserta didik sebelum fungsi mental yang lebih tinggi terserap dalam diri peserta didik tersebut.<sup>37</sup>

**d. Tenaga kependidikan sebagai tenaga ahli untuk efektifitas pembelajaran**

Dalam implementasi Kurikulum 2013 pengadaan dan pembinaan tenaga ahli yang memiliki sikap, pribadi, kompetensi dan keterampilan yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter sangat diperlukan. Hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat berkaitan dengan deskripsi kerja yang akan dilakukan oleh masing-masing tenaga kependidikan. Dalam pada itu, Kurikulum 2013 yang akan diimplementasikan secara terbatas pada semua MI pada bulan Juli 2014, rencananya dilakukan pendampingan. Oleh karena itu, tenaga kependidikan bukan lagi dipandang hanya sebagai faktor pelengkap, tetapi mereka menjadi faktor penunjang dan penting bagi keberhasilan dalam implementasi kurikulum 2013 ini.<sup>38</sup> Oleh karenanya sangat diharapkan tenaga kependidikan ini menjadi tenaga ahli agar setiap personil memiliki pemahaman dan kompetensi yang menunjang terlaksananya pembelajaran tematik integratif dalam mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.

<sup>35</sup> Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran...*, hlm. 28

<sup>36</sup> Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran...*, hlm. 37-38

<sup>37</sup> Rusman, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Cet. V (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 209

<sup>38</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi...*, hlm. 105

**e. Guru adalah fasilitator, mitra pembelajaran dan individu yang kreatif**

Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi antara lain ingin mengubah pola pendidikan dari orientasi hasil dan materi ke pendidikan sebagai proses, melalui pendekatan tematik-integratif dengan *contextual teaching and learning* (CTL). Oleh karena itu, pembelajaran harus sebanyak mungkin melibatkan peserta didik agar mereka mampu bereksplorasi untuk membentuk kompetensi dengan menggali kompetensi, dan kebenaran ilmiah. Dalam kerangka inilah perlunya kreativitas guru agar mereka mampu menjadi fasilitator dan mitra belajar bagi peserta didik. Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi harus kreatif memberikan layanan dan kemudahan belajar (*facilitate learning*) kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Rasa gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka merupakan modal dasar bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi, menghadapi berbagai kemungkinan, dan memasuki era globalisasi yang penuh berbagaitantangan.<sup>39</sup>

Hal tersebut selaras dengan pandangan teori progresivisme, bahwa guru tidak bisa sebagai 'rujukan' dalam pengertian tradisional, yaitu sebagai penyalur informasi esensial. Ini benar karena realitas utama eksistensi manusia itu berubah, dan sebagai akibatnya tak seorang pun mengetahui bentuk masa yang akan datang dan informasi esensial (baku tak berubah) yang dibutuhkan di masa depan. Jadi, tidak bisa ada pengajaran otoritatif pun tentang serangkaian terbatas pengetahuan esensial. Guru hendaknya adalah orang yang mau belajar bersama para subjek didiknya sambil ia berupayamemanfaatkan energi dan ketertarikan langsung merekadalam keseriusan pengalaman belajar. Peran guru dapatdilihat sebagai peran membantu subjek didik belajarbagaimana belajar mandiri sehingga ia akan menjadi sosok orang dewasa yang mandiri dalam lingkungan yang berubah.<sup>40</sup>

**f. Fasilitas, sumber belajar dan lingkungan diberdayakan seluruhnya untuk pencapaian kompetensi peserta didik**

Keberhasilan implementasi kurikulum 2013 adalah fasilitas dan sumber belajar yang memadai, agar kurikulum yang sudah dirancang dapat

<sup>39</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi...*, hlm. 42

<sup>40</sup> George R. Knight, *Filsafat Pendidikan...* hlm. 151-152

dilaksanakan secara optimal. Secara umum fasilitas dan sumber belajar terdiri dari dua kelompok besar, yaitu fasilitas dan sumber belajar yang direncanakan (*by design*) dan yang dimanfaatkan (*by utilization*). Kedua jenis fasilitas dan sumber belajar tersebut dapat didayakan secara efektif dalam menyukseskan implementasi Kurikulum 2013. Pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar memiliki arti yang sangat penting, selain melengkapi, memelihara, dan memperkaya khasanah belajar, sumber belajar juga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajar, yang sangat menguntungkan baik bagi guru maupun peserta didik. Pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar secara maksimal, memungkinkan peserta didik menggali berbagai konsep yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari, sehingga menambah wawasan dan pemahaman yang senantiasa aktual, serta mampu mengikuti berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat dan lingkungannya. Kondisi inilah yang memungkinkan peserta didik memiliki kemampuan untuk bertindak secara lokal, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, dan berpikir dalam prespektif global sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (*act locally think globally*).<sup>41</sup>

**g. Kebijakan madrasah harus kondusif dan akomodatif dengan Kurikulum 2013**

Menurut Syafarudin, kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menciptakan perubahan di madrasah. Salah satu fokus kepala madrasah adalah membuat kebijakan.<sup>42</sup> Agar implementasi kurikulum 2013 berhasil dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah, maka dibutuhkan kebijakan madrasah yang mendukung implementasi perubahan kurikulum ini. Kebijakan yang jelas dan baik akan dapat memberikan kelancaran dan kemudahan dalam implementasi pembelajaran berbasis kompetensi. Menurut Mulyasa, ada beberapa kebijakan yang relevan diambil kepala sekolah dalam membantu kelancaran pengembangan pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu: *pertama*, memprogramkan perubahan kurikulum sebagai bagian integral dari program sekolah secara keseluruhan; *kedua*, menganggarkan biaya operasional pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter sebagai bagian dari anggaran sekolah; *ketiga*, meningkatkan mutu dan kualitas guru, serta fasilitator agar dapat bekerja secara profesional (meningkatkan profesionalisme guru); *keempat*, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kepentingan belajar, dan pembentukan kompetensi dasar; dan *kelima*, menjalin kerjasama yang baik dengan unsur-unsur terkait secara

<sup>41</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi...*, hlm. 49-50

<sup>42</sup> Syafarudin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strateji, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 132

resmi dalam kaitannya dengan pembelajaran berbasis kompetensi, seperti dunia usaha, pesantren, dan tokoh-tokoh masyarakat.<sup>43</sup>

#### **h. Kegiatan penilaian adalah kombinasi antara penilaian proses maupun hasil secara berkelanjutan dengan cara yang autentik**

Dalam kurikulum 2013, terdapat pergeseran dalam melakukan penilaian, yakni dari penilaian melalui tes (mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja), menuju penilaian autentik (mengukur kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil). Dalam penilaian autentik peserta didik diminta untuk menerapkan konsep atau teori pada dunia nyata. Autentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Penilaian autentik berbeda dengan penilaian tradisional. Penilaian tradisional peserta didik cenderung memilih respons yang tersedia, sedangkan dalam penilaian autentik peserta didik menampilkan atau mengerjakan suatu tugas atau proyek. Pada penilaian tradisional kemampuan berpikir yang dinilai cenderung pada level memahami dan fokusnya adalah guru. Pada penilaian autentik kemampuan berpikir yang dinilai adalah level konstruksi dan aplikasi serta fokusnya pada peserta didik. Penilaian autentik mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal). Dengan demikian, pencapaian kompetensi peserta didik tidak dalam konteks dibandingkan dengan peserta didik lainnya, tetapi dibandingkan dengan standar atau kriteria tertentu, yakni Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dalam penilaian autentik guru melakukan penilaian tidak hanya pada penilaian level KD, tetapi juga kompetensi inti dan SKL.<sup>44</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perubahan kebijakan implementasi kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah hendaknya dibarengisecara simultan dengan berkembangnya paradigma baru kepala madrasah agar implementasi kurikulum 2013 dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sejumlah paradigma yang diperlukan oleh kepala madrasah dalam mengaktifkan implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah yaitu sebagai berikut: sebagai pusat pembelajaran yang senyatanya, peserta didik harus diperlakukan sebagai individu yang unik; kegiatan pembelajaran adalah suatu proses interaktif, aktif-mencari, kritis, kolaboratif, bermultimedia, berbasis kebutuhan pengguna, dengan pola multidisiplin dan pendekatan *scientific*; tenaga kependidikan sebagai tenaga ahli yang harus dipersiapkan untuk menunjang efektifitas pembelajaran; guru adalah fasilitator

<sup>43</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi...*, hlm. 106

<sup>44</sup> Kunandar, *Penilaian Autentik...*, hlm. 36-37

dan mitra pembelajaran serta individu yang kreatif, fasilitas, sumber belajar dan lingkungan diberdayakan seluruhnya untuk pencapaian kompetensi peserta didik; kebijakan madrasah harus kondusif dan akomodatif dengan Kurikulum 2013; dan kegiatan penilaian adalah kombinasi antara penilaian proses maupun hasil secara berkelanjutan dengan cara yang autentik.

## Simpulan

Simpulan dari pembahasan di atas adalah *pertama*, kebijakan implementasi kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah sedikit berbeda dengan implementasi kurikulum 2013 di Kemendikbud, tetapi secara umum sama. Sebab, implementasi kurikulum 2013 di MI direncanakan pelaksanaannya mulai bulan Juli 2014, sedangkan di SD sudah sejak bulan Juli 2013. Kebijakan implementasi kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu diantaranya dengan pelatihan pendidik dan tenaga pendidikan yang meliputi guru, kepala madrasah, dan pengawas; pengembangan buku siswa dan buku pegangan bagi guru; pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Dalam kebijakan ini, ada empat elemen yang berubah meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Adapun cirikhas perubahan dalam implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah, yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran tematik-integratif untuk semua kelas, mata pelajaran umum (selain rumpun PAI) berkurang menjadi hanya 7 mata pelajaran, pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib, bahasa Inggris hanya sebagai ekstrakurikuler, dan belajar di madrasah lebih lama.

*Kedua*, kebijakan implementasi kurikulum baru, Kurikulum 2013, di Madrasah Ibtidaiyah hendaknya diiringi dengan dikembangkannya paradigma baru kepala madrasah agar implementasi kurikulum 2013 dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai tujuan semula. Sejumlah paradigma yang diperlukan oleh kepala madrasah untuk mengefektifkan implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah tersebut yaitu sebagai berikut: sebagai pusat pembelajaran yang senyatanya, peserta didik harus diperlakukan sebagai individu yang unik; kegiatan pembelajaran adalah suatu proses interaktif, aktif-mencari, kritis, kolaboratif, bermultimedia, berbasis kebutuhan pengguna, dengan pola multidisiplin dan pendekatan *scientific*; tenaga kependidikan sebagai tenaga ahli yang harus dipersiapkan untuk menunjang efektifitas pembelajaran; guru adalah fasilitator dan mitra pembelajaran serta individu yang kreatif, fasilitas, sumber belajar dan lingkungan diberdayakan seluruhnya untuk pencapaian kompetensi peserta didik; kebijakan madrasah harus kondusif dan akomodatif dengan Kurikulum 2013; dan kegiatan penilaian adalah kombinasi antara penilaian proses maupun hasil secara berkelanjutan dengan cara yang autentik.

## Rujukan

- Anonim, *Kurikulum 2013, Kemag Latih 140.000 Guru Madrasah*, Diupload Tanggal 12 Agustus 2013 Pukul 9.45 di [www.suarapembaruan.com/home/kurikulum-2013-kemag-latih-14000-guru-madrasah/39819](http://www.suarapembaruan.com/home/kurikulum-2013-kemag-latih-14000-guru-madrasah/39819), dan diakses pada Tanggal 10 April 2014 Pukul 23.29 WIB
- Armstrong, Thomas, *Kecerdasan Multipel di dalam Kelas*, Jakarta: Indeks, 2013.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud, *Strategi Implementasi Kurikulum 2013*, Jakarta: Kemendikbud, 2013.
- Knight, George R., *Filsafat Pendidikan*, Diterj. oleh: Mahmud Arif, Yogyakarta: CDIE bekerjasama dengan Gama Media, 2007.
- Kuhn, Thomas S., *The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Cet. VI, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Kunandar, *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Majid, Abdul, *Pembelajaran Tematik Terpadu*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mulyasa, E., *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nugroho, Riant, *Public Policy*, Cet. IV, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Permenang RI No. 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
- Pemendikbud RI No. 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
- Rawita, Ino Sutisno, *Kebijakan Pendidikan: Teori, Implementasi, dan Monev*, Cet. III, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2013.
- Rusdiana, H.A., *Konsep Inovasi Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Rusman, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Cet. V, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sanaky, Hujair AH., *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta: Safiria Insania Press Bekerjasama dengan Magister Studi Islam UII, 2003.

Surat Edaran Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia No. SE/Dj.I/PP.00/50/2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 pada Madrasah

Syafarudin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Stratei, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Trianto, *Medesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, Landasan dan Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Cet. VI, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: CPAS, 2011.